

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sekarang ini, studi hubungan internasional masih dalam kondisi yang cukup rancau. Globalisasi ini meluas dan meningkatnya hubungan ekonomi, sosial dan budaya yang melewati batas-batas negara atau ranah internasional.¹ Era globalisasi ini memaksa kita untuk menerima proses penyebaran unsur-unsur baru baik teknologi maupun informasi secara mendunia melalui media elektronik, maupun digital. Globalisasi juga yang menyangkut sebuah proses di mana penduduk dunia terhubung ke dalam komunitas dunia yang tunggal atau di kenal dengan komunitas global. Hal ini sangat mempengaruhi perubahan dunia yang signifikan dalam hubungan internasional, khususnya dalam bidang diplomasi. Hal itu menjadikan Negara tidak menjadi *dominant actor* meski tetap menjadi *primary Actor*²

Diplomasi sendiri bisa di katakan sebagai politik luar negeri suatu negara sebagai proses dan alat untuk memperoleh pencapaian kepentingan nasional melalui hubungan negara dengan negara yang sekarang ini terus mengalami perubahan di era global. Hal itu juga membutuhkan peran diplomasi non pemerintah (*Non-government*) sebagai aktor diplomasi. Sesuai perkembangannya aktor yang tidak hanya terdefinisi pada aktor tunggal yaitu

¹ Robert Jackson & Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, (Yogyakarta : pustaka pelajar, 2005), hlm, hlm. 266.

² Conway Henderson, *International Relations; Conflict and Cooperation at the Turn of Century* (Singapore; McGraw Hill, 1998)

negara dalam dunia hubungan internasional, namun menurut perkembangannya ada aktor lain yang ikut serta dalam politik internasional, seperti perusahaan multi nasional (*Multinational corporations*), organisasi non-pemerintah (*Non-government organizations*), organisasi antar pemerintah (*Inter-government organizations*) kelompok agama, etnis, bahkan individu. Meskipun peranan negara masih menjadi aktor utama, akan tetapi banyak aktor lain dapat melakukannya.

Diplomasi keagamaan dipicu pada kondisi global yang pada awal 1990an di tandai pada berakhirnya perang dingin, menjadikan negara bukan lagi aktor utama untuk tujuan nasional. Oleh sebab itu pasca perang dingin masyarakat internasional lebih banyak memberikan perhatian pada isu-isu kemanusiaan, seperti hak asasi manusia, lingkungan hidup, pemerintah yang bersih (*good governance*), demokrasi. Isu-isu tersebut dulunya dianggap *low politic* dari pada isu-isu politik dan keamanan yang merupakan *high politic*. Bergesernya waktu hubungan internasional telah meningkatkan ketertarikan badan-badan dan lembaga-lembaga bukan pemerintah untuk terlibat dalam diplomasi dan pembentukan politik luar negeri. Selain itu, muncul pula kesadaran yang lebih mendalam bahwa negara satu sama lain saling tergantung dan memiliki keterkaitan (*interconnectedness*) yang semakin kental.³

³ Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi antara Teori dan Praktek*, (Jogjakarta : Graha Ilmu, 2012), hlm. 209.

Diplomasi bisa dikatakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan diplomasi jalur pertama yang dilakukan oleh wakil-wakil pemerintah. Akan tetapi, pada saat meningkatnya aktor utama yang bukan pemerintah atau bukan negara pada era 1990an, seperti NGO, menyebabkan negara bukan aktor utama lagi dalam hubungan internasional.

Nahdlatul Ulama secara epistemologi mempunyai arti “Kebangkitan Ulama”, sebuah organisasi yang didirikan sebagai tempat berhimpun seluruh ulama dan umat Islam. Sedangkan menurut istilah Nahdlatul Ulama adalah *Jam’iyyah diniyah* yang berhaluan *Ahlusunnah wal jama’ah*.⁴

Nahdlatul Ulama bisa dikatakan organisasi Islam terbesar di Indonesia⁵ yang didirikan oleh para ulama pada 16 Rajab 1344 H/31 Januari 1926 M,⁶ di kampung Kertopaten Surabaya. Hal ini bisa dilihat dari pengikutnya sejumlah 237,7 juta jiwa dari data bps 2010.⁷ Nahdlatul Ulama bisa dikatakan sebuah organisasi keagamaan non-pemerintah yang berasal dari Indonesia dan didirikan oleh KH. Muhammad Hasyim Asy’ari. Tujuannya adalah terwujudnya kesejahteraan kehidupan, terwujudnya penegak keadilan, terwujudnya sistem demokrasi yang berakhlakul karimah.⁸ Sejak awal organisasi ini secara manifest menegaskan diri sebagai pendukung paham *Ahl- Sunnah wa al jamaah* menampilkan corak yang khas, berbeda

⁴ www.Academia.edu (di akses pada 15 agustus 2017)

⁵ Ahmad baso, *NU Studies: pergolakan pemikiran antara fundamentalisme islam dan fundamentalisme neo-liberal*, (Jakarta : Erlangga,2006), hlm .421

⁶ Muhyiddin Abdusshomad, *Aqidah Ahlussunnah wal jama’ah*, (Surabaya : Khalista Surabaya Indonesia, 2009), hlm. 1

⁷ Sri noviana, Gerakan perempuan Nahdlatul Ulama dalam transformasi pendidikan politik; jurnal pendidikan . volume III,nomor 2, desember 2014, hlm 403.

⁸ ibid

dengan ekspresi paham ini di negara muslim lainya di Indonesia.⁹Pendirian Nahdlatul Ulama itu sendiri di latar belakang motif mempertahankan faham Islam *Ahlussunnah wal Jamaah* atas reaksi terhadap faham Sekuleralisasi barat, Penjajahan Belanda, Jepang dan keawatiran hilangnya nilai nilai Islam yang tradisional sehingga terbentuklah Nahdlatul Ulama. Hal itu sesuai dengan di butuhkan sebuah peran penting organisasi non pemerintah (*Non-government*) dalam penyelesaian konflik domestik disuatu negara.

Pada perkembanganya diplomasi menjadi meluas seperti terciptanya diplomasi jalur ketujuh, Nahdlatul Ulama sendiri sebuah organisasi yang berlandaskan atas Islam yang “*Rahmatan lilalamin*” inilah yang semata-mata yang di anut kaum muslimin Indonesia sejak awal, berabad abad lalu.¹⁰ Contohnya sendiri ikut serta upaya yang dilakukan Nahdlatul Ulama peran yang aktif dalam penyelesaian konflik di Rohingya Myanmar, terbukti pada Tahun 2016 ikut kontribusi dalam dunia internasional dalam masalah Afganistan, Thailand maupun Myanmar.

Konflik di Myanmar muncul karna pertikain antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine, di mana Rakhine dapat dukungan dari pemerintah Myanma, seperti pembiaran terhadap aksi kekerasan yang terjadi pada Juni 2012. Konflik ini mengakibatkan paling tidak 80 orang tewas dalam kejadian

⁹ Zuhri, Ahmad Muhibin, *Pemikiran KH.M. Hasyim Asy'ari tentang Ahl Al Sunnah Wa Al-jama'ah*, (Surabaya : khalista,2010), hlm. 7.

¹⁰ Muzadi, Abdul Muchith , *Mengenal Nadlatul Ulama*, (Surabaya : khalista, 2006), hlm. 2.

itu, dalam kejadian tersebut pemerintah Myanmar dianggap oleh banyak pihak telah melanggar nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM).¹¹

Rohingya adalah etnis yang kebanyakan beragama Islam Sunni di negara bagian Rakhine utara Myanmar barat .jumlah populasinya di perkirakan sekitar 1 juta dan terkonsentrasi di dua kota utara Rakhine (Arakah). Adapun beberapa negara lain yang menjadi tempat populasi etnis Rohingya Bangladesh, Pakistan, Arab saudi dan Thailand.¹²

Konflik domestik di Rakhine Myanmar berawal dari masing masing kelompok etnis Rohingya dan Rekhine yang beragama Hindu yang memiliki tujuan terhadap masalah yang di pertentangkan, di mana pemerintah Myanmar di angap sebagai pelangar HAM dalam menangani konflik, seperti pembiaran kekerasan, pembubuhan, upaya deportasi dan pemindahan dengan cara paksa hingga saat ini belum selesai. sehingga sampai saat ini belum ketemu titik permasalahanya. menurut penulis sendiri sebagai pemicu utama bukanlah Agama melaikana politik dan klaim sejarah yang sulit untuk di pertemukan solusinya.

Konflik domestik ini sendiri meliputi peperangan antar etnis, kekerasan, pemerkosaan, pembakaran rumah, sekolah,tempat ibadah, bahkan pengusiran di wilayah Rohingya di karenakan klaim sejarah dan hak tinggal di tempat Rekhine (Arakah). Sehingga konflik yang terjadi pada saat ini terdengar di keseluruhan dalam dunia internasional. Selain itu dalam

¹¹<http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/08/120806> . (diakses Pada tanggal 21 maret 2017 Pukul 10.53 wib).

¹²<http://id.wikimapia.org/wiki/Rohingya.di>. (diakses Tanggal 21 maret 2017 Pukul 11.04 wib).

penyelesaian dari konflik ini semakin sulit untuk diselesaikan karena pemerintah Myanmar mempunyai sikap yang tidak terbuka dengan dunia internasional.

Dari data PBB lebih dari 1000 warga etnis Rohingya meninggal selama beberapa bulan terakhir, data tersebut dari kesaksian pengungsi yang melarikan diri empat bulan yang lalu.¹³ Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) sendiri telah berupaya membantu permasalahan ini dan khususnya *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR) badan yang menangani masalah HAM menegaskan bahwa pemerintah Myanmar terlibat dalam pembantaian yang dialami oleh etnis Rohingya. OHCHR mewakili komitmen universal cita di dunia untuk manusia yang lebih bermangfaat, dengan mandat yang unik dari masyarakat internasional untuk memajukan dan melindungi semua Hak Asasi Manusia (HAM).¹⁴

Penulis melihat dalam kasus di atas menandakan masih dibutuhkan jalur diplomasi dalam kelompok non-pemerintah (*Non government organizations*) yang memiliki peran penting dalam tataran hubungan internasional, yang didalamnya meliputi kegiatan ajaran moral, perdamaian dalam penyelesaian konflik. Salah satu bentuk kepedulian Nahdlatul Ulama dalam konflik Rakhine Myanmar adalah memberikan perhatian melalui ikut serta dan berperan aktif dalam penyelesaian kasus konflik Rohingya di Rakhine Myanmar melalui diplomasi, dan juga dengan hadirnya Nahdlatul

¹³ Glori K wardianto, "PBB seribuan warga rohingnya tewas selama operasi militer Myanmar", www.kompas.com, (9 februari 2017, di akses 6 maret 2017 jam 16:43 Wib).

¹⁴ <http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/WhoWeAre.aspx> . (di akses pada tanggal 21 maret 2017 Pada jam 11.29 wib).

Ulama ikut serta peran aktif mendesak Indonesia dan ASEAN agar mengambil sikap dan langkah kongkrit terhadap pemerintah Myanmar untuk segera memberikan resolusi pengakuan setatus kewarganegaraan Muslim Rohingnya.¹⁵ Dengan melihat latar belakang di atas maka penulis mengambil judul akhir *“diplomasi keagamaan Nahdlatul Ulama dalam resolusi konflik Rohingya Myanmar”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah ini : *“Mengapa Nahdlatul Ulama terlibat dalam resolusi konflik domestik Rohingya Myanmar”?*

C. Tujuan Penelitian

Dari penelitian dan rumusan masalah di atas, maka penulis dapat ditentukan tujuan penelitian ini, adalah : *“Untuk Mengetahui alasan Nahdlatul Ulama terlibat dalam resolusi konflik domestik Rohingya Myanmar.*

D. Kerangka Teori

Teori merupakan pertanyaan umum yang menggambarkan dan menjelaskan penyebab atau pengaruh dari suatu fenomena tertentu. teori terdiri dari hukum sebab akibat atau hipotesis, eksplanasi dan kondisi Anteseden.¹⁶ Teori juga di sebut atau sering di definisikan sebagai seperangkat konsep atau lebih serta memberi penjelasan mengapa hal itu bisa terjadi, teori sangat membantu penulis untuk mengorganisasi gagasan

¹⁵ Rezki alvionitasari, “ NU mengutuk serangan Militer Myanmar terhadap muslim Rohingya”, www.Tempo.com (,22 november 2016,05:32 wib di akses pada 6 maret 2017) 19 :38 Wib.

¹⁶ Bakry, Umar suryadi, *metode penelitian hubungan internasional*, (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2016), hlm 127

fenomena atau gejala yang diteliti. Adapun teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

D.1 Diplomasi

Aktivitas diplomasi dilakukan sejak dulu berkembang di Eropa barat pada Abad 20 M dan munculnya kekuatan baru Amerika Serikat sebagai kekuatan yang mampu mempengaruhi praktik diplomasi secara signifikan. Amerika Serikat memasuki babak baru dalam politik internasional pada tahun 1917 atau setelah perang dingin, kekuatannya sendiri telah meningkat pesat dan memiliki keyakinan yang tinggi dalam memegang nilai-nilai, sehingga pengaruhnya sangat dirasakan oleh Liga Bangsa-Bangsa.

Diplomasi modern juga ditandai dengan perubahan-perubahan dalam aktor-aktor tradisional yang terdiri atas perwakilan-perwakilan pemerintah sehingga terlibat yang lebih besar menjadi media massa, NGO dan perorangan.¹⁷ Terdapat beberapa macam definisi diplomasi yang dikemukakan oleh berbagai pihak yaitu:

1. Menurut **Sir Ernest Satow** mendefinisikan diplomasi sebagai aplikasi intelektual dan taktik untuk menjalankan hubungan resmi antara pemerintah yang berdaulat, yang kadangkala diperluas dengan hubungan dengan negara-negara jajahannya.¹⁸

¹⁷ Sukwarsini Djelantik, *Op.cit.*, hal 35

¹⁸ Sir Ernest Satow, *A Guide to Diplomatic Practice*, (Longman Green & Co, NY, 1992), hlm

2. Menurut **Ivo D. Duchacek** diplomasi adalah praktek pelaksanaan politik luar negeri suatu negara dengan cara negosiasi dengan negara lain.¹⁹
3. Menurut **S.L Roy**, dari beberapa definisi tentang diplomasi, terdapat hal-hal yang tampak jelas. Bahwa : (1) Unsur pokok diplomasi merupakan negosiasi, (2) Negosiasi dilakukan dengan untuk mengedepankan kepentingan Negara, (3) tindakan tindakan diplomasi di ambil untuk menjaga serta memajukan kepentingan nasional, (4) Teknik-teknik diplomatik yang sering di pakai untuk mempersiapkan perang bukan menghasilkan perdamaian, (5) Diplomasi berhubungan erat dengan politik luar negeri negara (6) diplomasi modern berhubungan dengan sisitem negara (7) diplomasi tidak dapat dipisahkan dari perwakilan negara.²⁰
- 4.

D.2 Diplomasi Keagamaan (*Religion or peacemaking through faith in action*)

Diplomasi keagamaan yang diartikan mengambaran terwujudnya perdamaian melalui kepercayaan, hal ini dipelajari bagaimana suatu kepercayaan dan kegiatan yang berorientasi perdamaian oleh komunitas spiritual atau religious, serta gerakan berbasis moral *pacifisme* (percaya bahwa resolusi konflik dengan jalan damai adalah yang paling benar), *sanctuary* (sebagai tempat yang di anggap suci dan mampu melindungi

¹⁹ S.L.Roy, *Diplomacy*, Terj. Harwanto dan Mirsawati (Jakarta, rajawali pres, 1991), Hlm 3.

²⁰ Ibid. hlm 16

seseorang) dalam anti kekerasan. Oleh sebab itu tidak menentunya keadaan sekarang ini membutuhkan aktor lain seperti agama sebagai aktor dalam diplomasi. Pengabungan antara kepentingan keagamaan dan politik internasional yang menjadikan agama sebagai salah satu solusi dalam dunia internasional atau kebutuhan politik identitas pada saat ini yang sangat di butuhkan.

Pemahaman berbangsa dan bernegara seseorang sangat erat kaitanya dengan nilai nilai beragama yang di jalani sehingga perbedaan pandangan dan persepsi bisa menghasilkan konflik.²¹Walapun demikian, pemahaman mengenai diplomasi keagamaan sangat bergantung pada prespektif atau nilai nilai yang ada dalam ajaran agama. Oleh sebab itu upaya mempersatukan dengan cara *tabayyun* dalam konflik antar dua pihak yang berbeda dalam pandangan agama atau kepercayaan harus di dasari dengan nilai nilai kesamaan, visi, tujuan pandangan dalam agama dari beberapa belah pihak yang bersangkutan.

Prinsip dasar dalam diplomasi kegamaan tidak di pungkiri menekankan pada ketuhanan. Ketuhanan sangat penting di karnakan sebagai aspek utama dalam tatanan politik. Dari prinsip inilah menjadikan kehidupan manusia seperti kekuasaan, hak hak penduduk dan aspek lainnya yang bersumber pada kitab suci. Ada prinsip lain yang fundamental istilah seperti itu dalam diplomasi keagamaan rekonsiliasi berbagai agama mengenal konsep ini dalam berbagang berbeda. Istilah

²¹ Douglas M. Johnston, di presentasikan dalam norwegia chaplains corps 50th Anniversary Conference on conflict and peace-religion, the missing link? Oktober,25,2003.

seperti dalam islam “*salama*” yang berarti keamanan, dengan demikian hamper semua agama memiliki prinsip yang sama yaitu rekonsiliasi. Meskipun dengan out-put yang berbeda atau orientasi yang berbeda, penerapan inilah yang bisa merajut kesamaan dalam perbedaan menjadi satu agar tercipta kesepahaman dengan yang lain.

Louise Diamond dan John Mcdonald menjelaskan sembilan jalur diplomasi yang di kenal dengan “*Multitrack diplomasi*”. Terdapat sembilan jalur diplomasi yang diidentifikasi dari aktor dan institusi yang terlibat ,yaitu :

1. Pemerintah
2. Non-pemerintah atau profesional
3. Pembisnis
4. Masyarakat privat
5. Penelitian, pelatihan dan edukasi
6. Aktivis
7. Keagamaan
8. Pendanaan
9. Komunikasi dan media

Diplomasi keagamaan di sebut juga dengan *Multytrack diplomasi* ke tujuh ialah diplomasi yang berbasis pada komunitas agama. Komunitas spiritual dan religius di pandang sebagai pihak yang bertindak melalui keyakinan, didasari moral, berorientasi damai, komunitas-komunitas ini mengusahakan pencapaian perdamaian yang menghindari

kekerasan dan perang. Nilai-nilai positif yang dipromosikan bersifat universal dan mengarah pada kebaikan manusia.²²

Adapun asumsi-asumsi yang mendasari diplomasi keagamaan menurut Rizal Pangabean, yang pertama adalah keyakinan terhadap kesatuan umat manusia. Hal ini dikarenakan memang pada umumnya agama berlandaskan tali persaudaraan. Yang kedua, adalah cinta dan kasih sayang yang dapat menjadi sarana dalam mencerminkan kesatuan yang tercipta dengan adanya agama. Yang ketiga adalah agama sebagai jalur diplomasi mampu menyelesaikan konflik dan menciptakan perdamaian. Dan keempat perdamaian adalah sumber utama dari religiositas.²³

Praktek diplomasi keagamaan memiliki berbagai cara dalam pelaksanaannya, antara lain :

1. Penanaman Visi Moral

Moral sebagai nilai dasar yang secara umum disepakati oleh berbagai agama menjadi penting mengingat inilah kesamaan utama dari berbagai macam agama di dunia. Diplomasi keagamaan menyebarkan nilai-nilai diplomasi yang meliputi prinsip pluralis, toleransi, penciptaan perdamaian melalui resolusi konflik, keadilan sosial, pengampunan, penyembuhan luka bersama. Nilai-nilai ini di kenalkan melalui berbagai forum, seperti seminar dan pelatihan-pelatihan.

²² Mc Donald, John W. 2012 "Multy track diplomacy system" dalam jurnal of conflict topogy <http://journal-of-conflictology.uoc.edu> . (di akses pada 13 juli 2017)

²³ ibid

2. Kinerja Masyarakat Madani

Kader pejuang ini berupaya membangkitkan kembali konsep Masyarakat Madani di berbagai organisasi seperti lembaga pendidikan, keagamaan, perusahaan bahkan pemerintah. Tindakan ini didasari pada teori mengenai masyarakat madani oleh Hegel menyatakan bahwa masyarakat lapisan tengah ini merupakan sumber utama partisipasi demokrasi. Oleh karena itu, masyarakat madani adalah titik strategis bagi diplomasi keagamaan karna dapat di percaya membawa misi perdamaian yang berkelanjutan.

3. Hubungan Pribadi

Hubungan pribadi merupakan bumbu khusus yang di perlukan untuk menyatukan para pemimpin baik politik maupun militer yang akan mengerjakan rekonsiliasi

4. Percakapan Piritual

Percakapan ini melibatkan permasalahan yang sangat pribadi dalam diri seseorang seperti hubungan persahabatanya, orang-orang kekasih, harapan karir masa depan, serta hubungan dengan mereka dengan Tuhan. Percakapan ini dipercaya akan membawa kelembutan hati seseorang menjadi mudah memaafkan

5. Ibadah puasa seorang penganut agama yang baik melaksanakan ibadah dan juga puasa , oleh karena itu keduanya di anggap dapat mempengaruhi diplomasi keagamaan. Praktek-praktek ibadah ini

mampu membawa transmormasi personal seseorang sehingga memunculkan rasa belas kasihan dan kelembutan hati.

6. Ritual Rekonsiliasi

Berbagai ritual dan upacara yang umumnya dilakukan untuk beribadah dapat di arahkan sebagai media resolusi konflik dan transmormasi pribadi. Ibadah, kitab-kitab suci dapat menjadi alat diplomasi keagamaan.

E. Metode Penelitian

E.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, deskriptif kualitatif yaitu penelitian di mana penulis mencoba untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran secara sisitematis dan data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data penggambaran mengenai suatu fakta, perilaku, dan fenomena. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu fenomena secara detail untuk menggambarkan apa yang terjadi. Pendekatan kualitatif dipilih karena pendekatan ini akan menghasilkan data deskriptif. Menurut *Susan E. Wyse*: penelitian kualitatif adalah yang lebih bersifat eksplorasi penelitian ini digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang alasan,opini dan motivasi yang mendasari suatu perilaku.²⁴Tujuan yang di capai adalah berusaha untuk mendapatkan data menyeluruh tentang situasi yang sedang di pelajar

²⁴ Bakry, Op.cit.,hal 17.

oleh peneliti.²⁵ Dalam menggunakan metode ini perlu dilaksanakan dengan langkah langkah yang sistematis dan terencana supaya sasaran dalam skripsi dapat tercapai.

E.2. Data dan Sumbernya

Sumber data merupakan subyek dimana data dapat diperoleh, maka dalam penelitian ini data diklasifikan menurut obyek yang menjadi penelitian. Adapun bentuk data dalam penelitian ini adalah: Data yang di gunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang di peroleh secara tidak langsung, yakni bersumber dari literatur buku, surat kabar, internet, jurnal, makalah, brosur-brosur serta sumber dokumen lain yang masih relevan dengan penelitian ini.

E.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka dan dokumentasi. Teknik ini dengan cara membaca, mengamati, dan mempelajari dokumen mengenai obyek penelitian berupa literatur buku, internet, jurnal, surat kabar, serta laporan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian.

²⁵25 R.Bogdan and S.J.Taylor , Intoduction To Qualitative Rearch Methods, new york, Wiley 1975.

E.4. Teknik Analisis Data

Metode analisa data yang di gunakan oleh penulis adalah analisis data kualitatif, Adapun langkah-langkah yang dipergunakan dalam analisa data kualitatif, setelah data-data terkumpul dari berbagai sumber yaitu :

- 1) Menelaah data
- 2) Reduksi data
- 3) Penyusunan dalam satuan - satuan
- 4) Dikategorisasikan
- 5) Mengadaan pemeriksaan keabsahan data
- 6) Penafsiran data

Pada tahap ini data dikerjakan sedemikian rupa sehingga berhasil menyimpulkan kebenaran yang dapat dipakai untuk persoalan penelitian. tujuan dari analisa data ini adalah menyajikan dan menganalisa fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan.

E.5. Sistem Penulisan

Untuk mendapatkan hasil penelitian secara sistematis dan mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian ini, maka penulisan skripsi dengan judul “*diplomasi keagamaan Nahdlatul Ulama dalam resolusi konflik rohingya myanmar*” ini dibagi menjadi empat bab dengan kerangka sebagai berikut:

Bab I :Pendahuluan

Merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Gambaran umum tentang Negara Myanmar dan Etnis Rohingya Myanmar

A. Gambaran Negara Myanmar

A.1. Sejarah Negara Myanmar

A.2. Bentuk negara dan sistem pemerintahannya

B. Gambaran Etnis Rohingya

C. Akar konflik Rohingya

C1. Sejarah Konflik Rohingya

C2. Perkembangan Konflik Rohingya

D. Tindakan diskriminatif Rohingya

Bab III : Diplomasi Nahdlatul Ulama dalam Resolusi Konflik Rohingnya Myanmar

A. Langkah langkah diplomasi Nahdlatul Ulama

1. Upaya rekonsiliasi Nahdlatul Ulama
2. Visi masyarakat Madani Nahdlatul Ulama
3. Visi moral Nahdlatul Ulama
4. Ritual rekonsiliasi Nahdlatul Ulama

B. Alasan diplomasi Nahdlatul Ulama

Bab.IV : Penutup Penelitian Berisi Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

B. Saran

